

## WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

35 (tiga Puluh lima) hari kerja.

## OUTPUT LAYANAN

Kartu Tanda Penyidik dari Kementerian Hukum dan HAM.



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
GEDUNG B LANTAI 1  
Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat 10110  
Telp. (021)3521468 Fax. (021) 3524583,  
Website : ula.kemendagri.go.id



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI  
Kementerian Dalam Negeri  
Republik Indonesia

## PENGUSULAN PERPANJANGAN KARTU ANGGOTA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)



DIREKTORAT JENDERAL  
BINA ADMINISTRASI  
KEWILAYAHAN

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

## LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka memberikan layanan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu terkait administrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan khususnya di Bidang Layanan Administrasi bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sehingga diperlukan upaya penanganan layanan administrasi yang dapat memudahkan Pemerintah Daerah dalam memproses administrasi Pejabat PPNS ke Sub Direktorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

## PERSYARATAN

1. KTP (Kartu Tanda Penyidik) PPNS;
2. SK PPNS Kemenkumham;
3. SK Penempatan / SK Jabatan Terakhir Dan Bekerja Di Bidang Teknik Operasional;
4. Pas Foto 4x6 (Berwarna, Latar Belakang Merah); dan
5. Berita Acara Sumpah Janji Pelantikan PPNS.

## DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
3. Permendagri No. 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**SIOLA**  
SISTEM INFORMASI ONLINE LAYANAN ADMINISTRASI

## ALUR REGISTRASI ADMINISTRASI ONLINE

